

Peran Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Sidoarjo

Zuhdiati Ermy Putri¹, dan Luluk Fauziah²

¹Politeknik Negeri Banyuwangi, Jalan Raya Jember Banyuwangi

²Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

email: Zuhdiati.eputri@mail.com; lulukfauz@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan upaya Pemerintah dalam pengembangan obyek wisata serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui *indept interview*. Penentuan informan diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Agar diperoleh data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan teruji validitasnya, maka dipergunakan triangulasi data, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah mulai dari menginventarisasi seluruh obyek wisata, pembagian wilayah pengembangan pariwisata (WPP), pembuatan fasilitas pelayanan wisata, promosi dan pembangunan sarana obyek wisata, memperbaiki aksesibilitas menuju obyek wisata, dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun faktor penghambat dalam pengembangan yaitu diantaranya keterbatasan infrastruktur, masih rendahnya sumber daya manusia kepariwisataan, rendahnya investasi dan dukungan stakeholder, penyebaran obyek wisata, lamanya tinggal wisatawan relatif sangat singkat. Namun terdapat faktor pendukungnya yaitu: tiap-tiap obyek wisata memiliki keunikan, letaknya strategis. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang lebih intens dan terarah, meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata. Terciptanya iklim Sapta Pesona perlu adanya promosi yang lebih giat dan sering sehingga masyarakat tahu produk yang ditawarkan.

Kata kunci: peran otonomi daerah, pengembangan obyek wisata

The Role Of Autonomy On Development Tourism Objects In Sidoarjo Regency

Abstract

The purpose of this study is to describe the Government's efforts in the development of tourism objects as well as the factors supporting and inhibiting the development of tourism in Sidoarjo. This research is a qualitative descriptive research. The data collection technique was used in deep interview. Informant determination was obtained by purposive sampling technique. In order to obtain data that really in accordance with the reality and validity tested, then used triangulation data, while the data analysis techniques using interactive analysis. The result of the research shows that the effort done by Sidoarjo regency government is starting from inventory all tourism object, dividethe area of tourism development (WPP), make tourism service facility, promote and buildthe tourism facilities, improve the access to tourism object, increase the

human resources (HR). The inhibiting factors in the development are the lack of infrastructure, the low human resources of tourism, the low investment and stakeholder support, the spread of tourism object, the short time to stay in the tourism area. But there are supporting factors, namely: each tourism attraction has a unique, strategic location. Therefore, there needs to be more intense and targeted coordination, increasing the involvement of private sector and society in developing tourism object. The creation of Sapta Pesona climate needs a more vigorous and frequent promotion so that people know the products offered.

Keywords: role of regional autonomy, development of tourism objects

Pendahuluan

Misi utama dari penerapan otonomi daerah adalah keinginan untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan otonomi daerah maka pengelolaan keuangan daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah, untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahan maka pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber keuangan yang cukup memadai. Konsekuensi yang besar ditanggung pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, antara lain fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*protective function*). Untuk melaksanakan ketiga fungsi pemerintahan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, dalam situasi ini daerah pasti berusaha menggali dan memajukan potensi yang ada dalam daerahnya. Pemerintah Daerah dihadapkan dengan dua masalah sekaligus, yang pertama adalah kenyataan bahwa pembiayaan untuk menjalankan pemerintahan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sangat besar, disisi lain daerah tersebut merupakan daerah yang minim sumber daya alam. Oleh karena itu jalan yang di tempuh adalah membangun sektor-sektor non-SDA, seperti sektor pariwisata.

Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi obyek wisata sangat prospektif. Prospek obyek wisata tersebut dapat dilihat dari realisasi meningkatnya kunjungan wisatawan pada tahun 2014 yang mencapai kenaikan hingga 29,57% (1.750.153) bila dibandingkan tahun 2011 (517.585). Terlebih lagi wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui Bandara Juanda di Sidoarjo terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008 (156.726), 2009 (158.076), 2010 (168.888) hingga 2011 sebesar 185.815 (LAKIP, 2015).

Kontribusi sektor wisata (hotel dan restoran) bagi PDRB Kabupaten Sidoarjo termasuk katagori tinggi, yaitu sebesar 52,79%. Salah satu potensi tersebut berada di dekat Bandara Juanda dan Jabon. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6/2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sidoarjo, kawasan pesisir sepanjang Bandara Juanda hingga Jabon telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pesisir yang dikenal sebagai kawasan minapolitan. Kawasan minapolitan memiliki potensi ekonomi lokal, ekowisata bahari, serta wisata religi (nyadran) yang prospektif. Namun potensi tersebut masih belum dikelola secara optimal guna peningkatan ekonomi masyarakat maupun daerah. Begitu halnya dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan potensi ekowisata

bahari serta pengelolaan hasil ikan pembudidayaan juga belum optimal. Padahal penerimaan (resepsi) dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi sumber daya alam sebagai ekowisata maupun pembudidayaan ikan termasuk positif dan baik (Rochmania, 2015).

Banyaknya sektor pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari peran Otonomi Daerah. Sejak diundangkannya UU No.22 dan 25 tahun 1999, daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Salah satu sektor yang dikembangkan adalah pariwisata. Pariwisata di daerah mempunyai potensi peningkatan pendapatan anggaran daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan baru di daerah memiliki tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah berlomba agar targetnya tercapai. Pengembangan berbagai sektor diperlukan untuk meununjang keberhasilan daerah.

Seperti pepatah tua, tak kenal maka tak sayang, potensi pariwisata daerah pastilah sangat dikenal oleh masyarakat daerah itu sendiri. Sewaktu pemerintahan masih sentralisasi, pemerintah pusat hanya mengetahui sedikit, atau bahkan tidak mengetahui sama sekali perihal potensi pariwisata yang ada di daerah. Oleh karena itu, pengembangan potensi pariwisata daerah saat itu sangatlah kurang. Ketidaktahuan pemerintah pusat itulah yang menyebabkan kurangnya perhatian untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah. Salah satu karakteristik otonomi daerah adalah unit-unit pemerintah bersifat otonom, mandiri dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat hanya mengontrol sedikit atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut. Dengan hal tersebut, unit pemerintah daerah bebas merencanakan dan menjalankan strategi kemajuan daerahnya masing-masing. Potensi daerah yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat dapat dikembangkan sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di daerah. Kemudahan yang difasilitasi oleh otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah menyusun strategi terbaik untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya. Perbedaan jenis wisata yang heterogen antara daerah satu dengan daerah lain memungkinkan satu daerah memiliki potensi unggulan yang tidak dimiliki daerah lain. Hal inilah yang diambil pemerintah daerah sebagai strategi memajukan daerahnya. Keunggulan yang dimiliki tidak akan tersaingi oleh daerah lain. *Red tape* dan prosedur yang berbelit juga sudah di-*cut* dengan adanya otonomi daerah. pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat yang berada di daerah lain. Jalinan yang baik antara pejabat dengan masyarakat lebih mudah tercipta dengan adanya otonomi daerah. Informasi yang didapat oleh pemerintah daerah juga lebih mudah karena masyarakat sekarang lebih dekat dengan pejabat dan pemerintahan di daerahnya.

Menurut Oka A. Yoeti (1997) memberikan pengertian obyek wisata adalah berbagai macam hal yang dapat dilihat, disaksikan, dilakukan atau dirasakan. Sementara Chafid Fandeli (1995) mengartikan obyekwisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Sedangkan menurut Gamal Suwanto (1997: 19) menyebutkan obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu : 1) Obyek wisata dan daya tarik wisata alam. Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam;

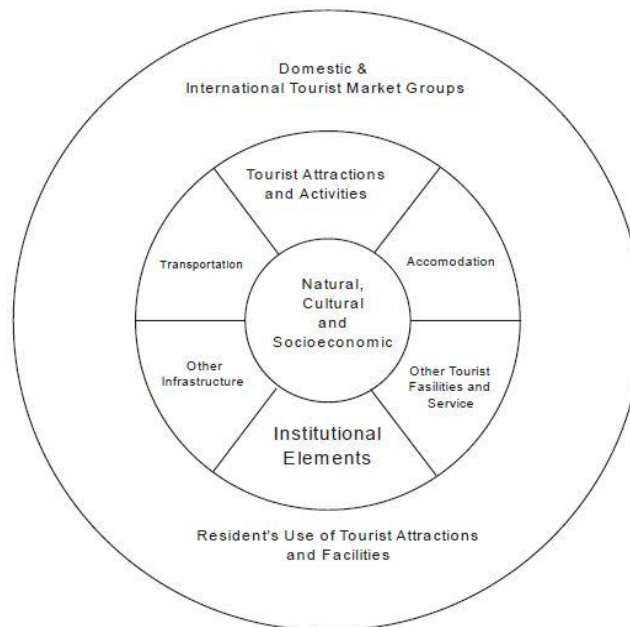
2) Obyek wisata dan daya tarik budaya. Obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya; 3) Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus Obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam *sustainability development* (McIntyre, 1993:10):

1. *Ecological Sustainability*, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.
2. *Social and Cultural Sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.
3. *Economic Sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

Sementara itu dilain hal, sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu. Sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar : Komponen Perencanaan Pengembangan Pariwisata



Sumber: Inskeep (1991:38)

Obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan cara profesional. Akan sangat mungkin jika Kabupaten Sidoarjo menjadi primadona kunjungan wisatawan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional dengan melihat pada potensi yang ada. Didukung oleh letak geografis yang strategis dan kondisi alam sangat indah. Perkembangan tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi, yang ingin melepaskan rutinitas keseharian dengan melakukan rekreasi baik sendiri maupun bersama keluarga menjadikan dorongan untuk mengunjungi obyek wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang tidak usah jauh-jauh harus keluar kota. Sehingga perlu adanya pengembangan obyek wisata yang sudah ada agar nantinya dapat bersaing dan menjadi primadona bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah : 1) Bagaimana peran otonomi daerah terhadap pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo. 2) faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah pariwisata, selain itu melakukan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti serta wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang ditunjuk dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam rangka mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh di lapangan dianalisa menggunakan metode analisa interaktif dari Miles Hubberman, yaitu peneliti dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Peran otonomi daerah terhadap pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat.

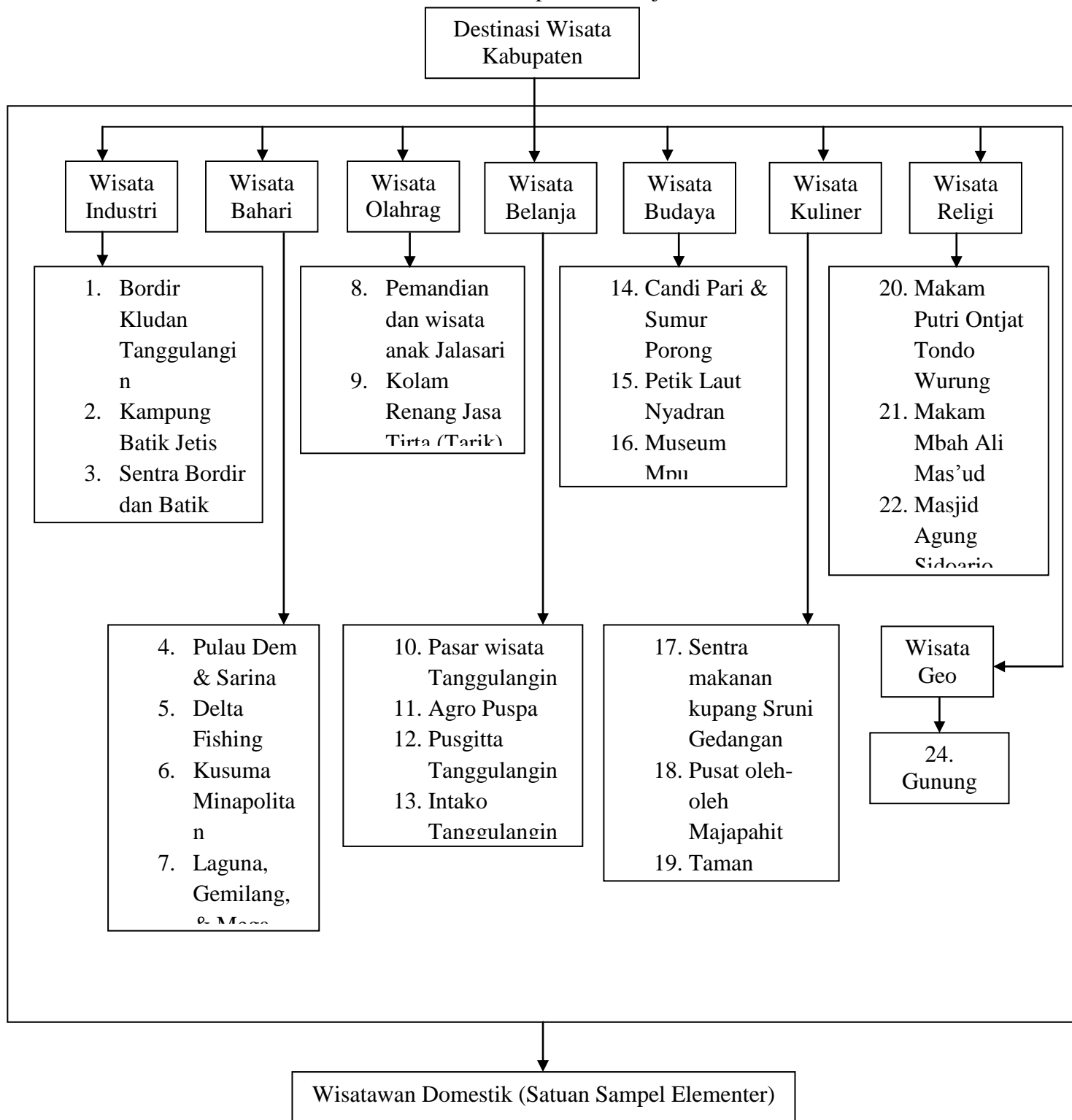
Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain. Peneliti lebih

tertarik dari salah satu sektor tersebut yaitu sektor pariwisata, karena Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi sektor pariwisata yang besar untuk dikembangkan.

Sektor pariwisata sangat dimungkinkan karena ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi. Menurut salah satu koordinator pariwisata Kabupaten Sidoarjo bahwa sifat dari pariwisata itu sendiri yaitu dinamis, dimana suatu saat akan muncul titik puncak kejenuhan atau kebosanan bagi wisatawan untuk menikmati kondisi yang sudah ada, dan itu sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan ke suatu objek wisata yang pastinya berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.

Kabupaten Sidoarjo mempunyai beberapa tempat obyek daerah tujuan wisata (ODTW) diantaranya : 1) Wisata Industrim; 2) Wisata Bahari ;3) Wisata Olah Raga; 4) Wisata Belanja; 5) Wisata Budaya; 6) Wisata Kuliner; 7) Wisata Reliji dan 8) Geo wisata Lumpur Lapindo. Lebih jelasnya sebagaimana tampak dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2 : Destinasi Wisata Kabupaten Sidoarjo



Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo

Pariwisata tidak akan menjadi destinasi jika tidak dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjadikannya dikenal, destinasi wisata membutuhkan promosi. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan objek mana yang akan dijadikan destinasi wisata serta mengatur bagaimana objek tersebut akan dikelola. Namun tanpa adanya promosi, objek wisata tersebut tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Kalaupun dikenal akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemerintah daerah memerlukan strategi promosi yang baik agar objek wisata yang dimiliki benar-benar menjadi destinasi wisata oleh wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Pariwisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo juga tidak terlepas dari permasalahan diantaranya :1) jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 mencapai 13.086 orang belum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2013 sebanyak 880.447 orang; 2) Peningkatan jumlah obyek wisata yang belum signifikan pada tahun 2015 sebanyak tiga (tiga obyek wisata) dan 3) pengolahan potensi obyek daerah tujuan wisata belum optimal.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dari pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo antara lain : dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan berbagai tambahan-tambahan fasilitas penunjang guna kenyamanan pengunjung. Dalam mengembangkan objek wisata daerah di Kabupaten Sidoarjo sangat penting dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung upaya pengembangan pariwisata daerah akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar itu sendiri. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar, yaitu: 1) mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata; 2) ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan khususnya; 3) mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mungkin mengadakan kerja bakti bersama-sama; 4) ikut melestarikan budaya adat-istiadat yang di sekitar objek wisata, budaya kuliner, dan lain-lain; serta 5) mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menciptakan pesona wisata atau yang disingkat 5K, yaitu: keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keramahan terhadap pengunjung.

Bidang Pariwisata mempunyai kelebihan diantaranya : 1) Jumlah objek wisata di Kabupaten Sidoarjo melebihi target RPJMD. 2) Banyaknya jumlah tambak yang dapat difungsikan sebagai objek wisata pemancingan. 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar di wilayah objek wisata yang mendirikan lapak-lapak/stand penjualan kebutuhan pengunjung. 4) Dukungan dana dari pemerintah desa setempat dalam pengembangan potensi ODTW daerah/desa. Serta 5) Peran serta masyarakat setempat dalam pengembangan potensi wisata lokal. Selain itu Bidang Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai peluang diantaranya : 1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penilaian dan penghargaan terhadap potensi wisata daerah. 2) Meningkatnya wisatawan yang transit di bandara Juanda dan terminal Bungurasih. 3) Bertambahnya kemitraan dengan luar daerah dan luar negeri dalam promosi objek wisata. 4) Peran media elektronik (televisi) untuk meningkatkan promosi. 5) Semakin

meningkatnya jumlah media sosial yang dapat mempromosikan objek wisata di Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo secara umum sebagai berikut :1) Dana yang terbatas. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib di dahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo sendiri.ktor

Bidang pariwisata di Kabupaten Sidoarjo mempunyai kekurangan diantaranya; 1) Selisih jumlah pengunjung pada tiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014; 2) Fasilitas pelayanan objek wisata rendah; 3) Kurangnya promosi objek daerah tujuan wisata; 4) Kurangnya koordinasi diantara *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu terdapat ancaman bagi pengembangan obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo diantaranya : 1) Adanya lokasi pariwisata lain yang dekat dengan daerah Kabupaten Sidoarjo di Lamongan, Jember, Pasuruan, Malang, Banyuwangi, dan Probolinggo. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat yang akan mengunjungi obyek daerah tujuan wisata (ODTW) di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu kelemahan yang ada di bidang pariwisata di Kabupaten Sidoarjo meliputi : 1) Rendahnya investor dalam negeri maupun asing dalam pengembangan pembangunan daerah wisata di Kabupaten Sidoarjo; 2) Potensi sektor wisata daerah yang kurang diekslore dengan baik sehingga ODTW hanya bersifat monoton; 3) Rendahnya minat masyarakat terhadap ODTW karena terkendala oleh sarana transportasi yang kurang memadai; serta 4) Tingginya promosi pariwisata luar daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kabupaten Sidoarjo sebenarnya mempunyai obyek wisata yang berpotensi menarik minat para wisatawan dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo, terdapat 8 (delapan) obyek wisata daerah yang juga dikelola Pemerintah Daerah khususnya dibawah pengawasan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagai pengelola pariwisata tersebut.

Belum memiliki aturan hukum atau peraturan daerah (PERDA) yang mengatur khusus tentang strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pustaka

Fandeli, C. (1997). *Dasar-Dasar manajemen kepariwisataan alam*. Liberty: Yogyakarta.

Kodhyat, H. (1996). *Sejarah pariwisata dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Lubis, H. & Husaini, M. *Teori-Teori organisasi*. Jakarta: Grasindo.

- Lubis, Z. & Osman, A. (2014). *Indonesian tourism sector: A potential sector that has not been optimized*. Australian Journal.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nyoman, S. P. (2003). *Ilmu pariwisata, sebuah pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Spillane, J. J. (1994). *Pariwisata Indonesia: siasat ekonomi dan rekayasa kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekadijo, R. G. (1997). *Anatomi pariwisata: Memahami pariwisata sebagai sistem linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Terence A. S. (2003). *Periklanan dan promosi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Wahab, S. (2003). *Manajemen kepariwisataan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Yoeti, O. A. (1990). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, O. A. 1996. *Pemasaran pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, O. A. (1997). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.